Frieska Haridha, Indra Kusumawardhana, Muhammad Firjatullah | *Private Boots on The Ground: Meretas Korelasi Kebangkitan Private Military Companies Dengan Globalisasi Ekonomi*

Article

Private Boots on The Ground: Meretas Korelasi Kebangkitan Private Military Companies Dengan Globalisasi Ekonomi

Frieska Haridha¹, Indra Kusumawardhana², Muhammad Firjatullah³

¹ Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pertamina Jakarta, Indonesia

² Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pertamina Jakarta, Indonesia

³ Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pertamina Jakarta, Indonesia

SUBMISSION TRACK

Received : 12 June 2019
Final Revision : 09 November 2019
Available Online : 30 November 2019

KEYWORD

Private Military Company, State, Conflict, War, Globalisation

KATA KUNCI

Private Military Company, Negara, Konflik, Perang, Globalisasi

CORRESPONDENCE

E-mail : indra15008@mail.unpad.ac.id

A B S T R A C T

This article targets an understanding related to the phenomenon of the rise of the Private Military Company which has strengthened its relations with the State in various conflicts in the world in the era of globalization - especially after the terrorist attacks on the United States in 2001. Using PMC understanding as an actor and the concept of globalization on economy, this paper questions why private military company existence become more precise after terrorism phenomenon. This paper provides a descriptive analysis of the correlation between the existence of PMC and the process of economic globalization that supports their existence in various conflicts in this world.

A B S T R A K

Artikel ini menyoroti suatu pemahaman terkait fenomena kebangkitan *Private Military Company* yang semakin menguat inter-relasinya dengan Negara di dalam berbagai konflik di dunia pada era globalisasi—terutama pasca serangan terorisme ke Amerika Serikat di tahun 2001. Menggunakan pemahaman terkait PMC sebagai suatu entitas dan konsep globalisasi ekonomi, tulisan ini mengajukan pertanyaan mengapa *private military company* semakin terkemuka setelah adanya fenomena terorisme. Tulisan ini memberikan analisis deskriptif terkait korelasi antara keberadaan PMC dengan proses globalisasi ekonomi yang mendukung keberadaan mereka di dalam berbagai konflik di dunia ini.

Pendahuluan

Pasca serangan 11 September 2001 terhadap gedung *World Trade Center* (WTC) di New York Amerika Serikat, dunia dihadapkan pada konflik panjang memerangi gerakan terorisme global yang digaungkan oleh Amerika Serikat. Kala itu, di berbagai dimensi keamanan internasional bergejolak dikarenakan upaya Amerika Serikat untuk melibatkan seluruh negara-negara dunia ke dalam pusaran konflik melawan terorisme yang dituduhkan pada kelompok Al-Qaeda. Bersamaan dengan agenda ini, salah satu fenomena menarik yang memengaruhi keamanan internasional adalah realitas bahwasanya perang terhadap terorisme di berbagai belahan dunia sangat mengandalkan kontraktor militer yang dipekerjakan untuk kepentingan tersebut, negara-negara di dunia juga semakin memanfaatkan keberadaan “*Private Military Companies*” (PMCs).

Pendapat ini selaras dengan pernyataan Kinsey yang menyatakan bahwasanya PMCs saat ini semakin menguat eksistensinya di panggung internasional, dimana mereka adalah aktor lintas-batas negara bahkan global yang aktif terlibat di dalam berbagai konflik di belahan dunia ini. Meskipun data spesifik tentang keberadaan PMCs dapat dikatakan sangat sumir dikarenakan kerahasiaan mereka dari panggung depan politik Global, namun estimasi data yang tersedia menyatakan bahwasanya industri PMCs saat ini telah mencakup lebih dari US\$100 Milyar pertahun dimana aktifitasnya tersebar di 50 negara.¹

Sementara itu, Globalisasi, merupakan kata yang tidak asing di dalam berbagai diskursus kontemporer politik dunia. Dalam berbagai media cetak maupun elektronik kata Globalisasi acap kali dikumandangkan, bahkan banyak yang

menyebut era kontemporer saat ini sebagai era globalisasi. Pemahaman terkait globalisasi itu sendiri bertolak dari realitas bahwasanya baik individu maupun negara semakin terikat satu dengan lainnya dalam berbagai bidang termasuk di dalamnya ekonomi sehingga menyebabkan timbulnya interdependensi ekonomi serta munculnya ekonomi dunia yang terintegrasi. Selain interdependensi serta integrasi ekonomi, globalisasi menyebabkan semakin mudarnya batasan-batasan geografis sehingga memudahkan perpindahan komoditi baik berupa barang maupun jasa, sumber daya alam maupun sumber daya manusia dari wilayah yang satu ke wilayah lainnya.² Mudahna perpindahan komoditi melewati batasan-batasan wilayah politik seperti negara inilah yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan perdagangan bebas.³ Adapun globalisasi ekonomi, oleh penelitian ini dipahami sebagai serangkaian proses yang mendorong integrasi kegiatan ekonomi di pasar antara barang dan jasa, secara timbal-balik, di seluruh batas geografis, dan peningkatan arti dari rantai nilai lintas batas dalam arus ekonomi internasional.⁴

Bila dilihat kembali maka globalisasi itu sendiri bukanlah hal baru namun merupakan proses evolusi yang telah berlangsung sepanjang sejarah manusia. Dimulai dengan adanya jalur sutera yang membuka hubungan antara Asia dengan Eropa, dilanjutkan dengan era kolonialisasi yang telah menghubungkan Eropa dengan berbagai belahan bumi lainnya di Amerika, Afrika, Asia hingga Australia, sampai pada

¹ Kinsey, Christopher. *Corporate soldiers and international security: The rise of private military companies*. Routledge, 2006:1.

² Scholte, Jan Aart. 2001, ‘The Globalization of World Politics’ dalam *The Globalization of World Politics*, ed. Baylis, J. & Smith, S., Oxford University Press Inc., New York.

³ Vogel, David. "Private global business regulation." *Annu. Rev. Polit. Sci.* 11 (2008): 261-282.

⁴ Kusumawardhana, Indra, and Rusdi Jarwo Abbas. "Indonesia di Persimpangan: Urgensi “Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender” di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires Pada Tahun 2017." *Jurnal HAM* 9, no. 2 (2018): 153-174.

era teknologi informasi saat ini dimana kita dapat dengan mudah dapat bertukar surat elektronik melalui internet dengan berbagai orang di seluruh dunia tanpa adanya batasan wilayah. Dengan mulai menghilangnya batasan-batasan yang ada melalui globalisasi mengakibatkan semakin mudarnya pula monopoli negara dalam banyak sektor, diantaranya seperti sektor informasi akibat semakin murah dan terjangkau perangkat telekomunikasi seperti telepon seluler dan perkembangan internet, sektor ekonomi melalui perkembangan Multi National Corporations (MNC), serta sektor keamanan dan militer melalui perkembangan *Private military Company* (PMC).

Bertolak dari pemahaman di atas, artikel ini, menyorot suatu pemahaman terkait korelasi, antara menguatnya eksistensi PMC yang diklaim oleh artikel ini sebagai suatu kebangkitan dibandingkan kemunculan, dengan globalisasi ekonomi yang telah melanda dunia pasca perang dingin berakhir. Pertanyaan utama yang diajukan oleh artikel ini adalah mengapa PMC semakin menguat eksistensinya di berbagai konflik dunia—terutama pasca serangan terorisme terhadap Amerika Serikat? Menggunakan konsep PMC sebagai suatu entitas di dalam studi keamanan kontemporer, serta globalisasi ekonomi sebagai suatu konsep. Artikel ini mengargumentasikan ada tiga faktor yang melandasi fenomena ini. Pertama, Pasca perang dingin, seluruh personel militer yang menjadi korban dari pemotongan anggaran belanja militer terdorong untuk menjual jasanya sebagai prajurit bayaran. Kedua, pergeseran fokus konflik yang pada Perang Dingin fokus pada konflik antar negara menjadi konflik antara negara dengan kelompok separatis dan teroris serta perang sipil. Ketiga, semakin banyaknya perusahaan yang menangkap dinamika tersebut sebagai peluang untuk mengembangkan bisnis kontraktor militer di berbagai belahan dunia.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menekankan pada analisis deskriptif dan eksplanatif. Metode kualitatif menjadi pilihan dalam menganalisis topik yang diangkat dikarenakan ketika mengkaji kehidupan manusia untuk kasus-kasus terbatas, sifatnya kasuistik dan kontekstual namun mendalam (*in depth*) dan bersifat total atau menyeluruh (*holistic*), dalam arti tidak mengedepankan pemilahan-pemilahan gejala secara konseptual ke dalam aspek-aspeknya yang eksklusif dan terisolir—metode penelitian kualitatif menjadi sangat bermanfaat untuk memberikan pemahaman yang komprehensif.⁵ Siapa pun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bersifat induktif, berfokus terhadap makna individual dan menerjemahkan kompleksitas sebuah situasi.⁶ Teknik pengumpulan data menggunakan upaya pengumpulan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur terkait yang difokuskan kepada bahan-bahan studi dokumen atau kepustakaan seperti buku, majalah, dokumen perjanjian internasional, makalah-makalah, jurnal, artikel-artikel, surat kabar serta situs-situs internet yang berkaitan dengan objek yang ditulis. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan memberikan suatu diskursus yang dapat menyajikan pemahaman terkait keberadaan *Private Military Companies* di era globalisasi ekonomi.

Teori

Globalisasi dan *Private Military Company*

Dalam tulisan ini, globalisasi dipahami sebagai “...a set of processes leading to the integration of economic activity in factor, intermediate, and final goods and services markets across geographical boundaries, and the increased salience of

⁵ Sutandyo Wignjosebroto, “Hukum Konsep dan Metode”, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 130

⁶ Bakry, Umar Suryadi. “Metode Penelitian Hubungan Internasional.” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

cross-border value chains in international economic flows". Berlandaskan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa globalisasi berasal dari konsep ekonomi, berbeda dengan konsep internasionalisme pada era perang dingin yang lebih berasal dari konsep politik.⁷

Dalam artian, proses interkoneksi ekonomi dunia menurut kebutuhan aktor-aktor di pasar telah menciptakan sebuah sistem ekonomi yang mengaburkan batas-batas negara-bangsa sebagai suatu genus pengorganisasian politik yang awamnya dianggap muncul pasca perjanjian westphalia di tahun 1648. Sejak pengakuan akan kedaulatan negara melalui Perjanjian Westphalia tahun 1648, negara telah diasumsikan sebagai satu-satunya aktor internasional yang berhak secara legal untuk memiliki dan menggunakan kekuatan militer.⁸ Namun semua itu mulai bergeser seiring dengan berkembangnya *private military company* (PMC).

Korelasi antara keberadaan PMC dengan berbagai konflik di era globalisasi dapat dipahami sebagai bentuk tuntutan negara-negara besar terutama Amerika Serikat dalam memainkan peran di berbagai konflik di dunia—terutama dalam konteks perang terorisme global yang menuntut mobilisasi sumber daya manusia yang cakap dalam melakukan perang melawan teroris, pendapat ini didukung oleh pendapat berikut "*Globalization seemingly permits the easy movement of people, products, services, and ideas across borders. This is often at the expense of state control. As well, communication technologies allow individuals and groups to coordinate, organize, and gather resources more effectively. They also permit allegiances, loyalties, and communities to flourish*

*transnationally. For James Rosenau, in such a "multi-centric system", the so-called sovereignty-free actors have the leg up on states.*⁹ Secara definisi PMC dapat dipahami sebagai,

*"PMSCs" are private business entities that provide military and/or security services, irrespective of how they describe themselves. Military and security services include, in particular, armed guarding and protection of persons and objects, such as convoys, buildings and other places; maintenance and operation of weapons systems; prisoner detention; and advice to or training of local forces and security personnel.*¹⁰

Oleh karenanya, keterbatasan untuk negara dalam merekrut dan melatih Sumber Daya Manusia yang terlatih dalam diterjunkan di dalam berbagai konflik yang memiliki ekstensitas tinggi menjadikan negara mengerlingkan matanya pada pasar yang dianggap mampu memberikan fleksibilitas dalam menyediakan para prajurit-prajurit terlatih yang siap untuk diterjunkan ke medan perang. Oleh karenanya, peluang ini menjadikan pihak swasta menangkap peluang ini sebagai jalan untuk memiliki kekuatan militer yang menyaingi kekuatan militer negara.

Keberadaan *private military company* sendiri, walaupun baru sering terdengar di media massa paska Perang Dingin, sesungguhnya bukanlah sesuatu hal baru dalam sejarah hubungan internasional. Sejak era Yunani Kuno (*Ancient Greece*) penggunaan tentara bayaran atau mercenary, yang merupakan cikal bakal dari *private military company*, telah merupakan hal yang umum. Contohnya dapat dilihat mulai dari perang antara negara-negara kota (*city states*) Yunani melawan kerajaan Persia di abad ke-4 sebelum masehi, dimana kedua belah pihak sama-sama menggunakan tentara bayaran

⁷ Kusumawardhana, Indra. "DARI INTERNASIONALISME KE GLOBALISASI: WHAT NEXT?." *Jurnal Populis* 2, no. 3 (2017).

⁸ Mingst, Karen A., Heather Elko McKibben, and Ivan M. Arreguin-Toft. *Essentials of international relations*. WW Norton & Company, 2018.

⁹ Spearin, Christopher. *Private military and security companies and states: Force divided*. Springer, 2017:2.

¹⁰ Ibid

dalam jumlah besar untuk memenangkan perang tersebut hingga Perang Tiga Puluh Tahun yang melahirkan Perjanjian Westphalia di abad ke-17 yang melibatkan tentara bayaran dari berbagai belahan dunia.¹¹

Tentara bayaran menjadi populer di era-era tersebut karena konsep kedaulatan negara dan tentara nasional (*standing army*), contohnya seperti TNI di Indonesia, masih jarang terdengar sehingga ketika perang terjadi, penggunaan tentara bayaran menjadi alternatif terbaik untuk mengumpulkan kekuatan militer dalam waktu singkat.¹² Selain itu, begitu konflik berakhir maka tentara bayaran tidak lagi diperkerjakan sehingga pihak yang memperkerjakan mereka tidak harus menanggung biaya upah bulanan dan pelatihan di masa damai seperti yang terjadi pada tentara nasional.

Namun seiring dengan perkembangan konsep kedaulatan negara dan pembentukan tentara nasional sebagai salah satu bentuk untuk menunjukkan kedaulatan tersebut seperti yang dipopulerkan oleh Napoleon Bonaparte paska Revolusi Perancis 1789-1799, maka penggunaan tentara bayaran mulai mengalami penurunan.¹³ Walaupun mengalami penurunan bukan berarti industri tentara bayaran ini hilang sama sekali, namun justru mengalami evolusi menjadi *private military company* (PMC) modern seperti yang kita kenal saat ini.

Sejalan dengan revolusi industri, kolonialisasi dan kelahiran berbagai Multi National Corporation (MNC) seiring dengan berjalannya globalisasi, maka berbagai sektor ekonomi yang dulunya dikuasai oleh negara mulai beralih menjadi dikuasai oleh swasta

termasuk didalamnya sektor militer yang mulai dikuasai oleh PMC.¹⁴ Bahkan dapat dikatakan bahwa ketiga faktor tersebut merupakan faktor utama yang mendorong kelahiran dari PMC (untuk kolonialisasi dan MNC akan dibahas lebih lanjut pada sub-bab *private military company: the (second) rise*). *Private military company* sendiri dapat di deskripsikan sebagai perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang industri militer seperti penyediaan tentara untuk perang (*mercenary*), petugas keamanan (*security guard*), pelatihan personel, penasihat militer (*military advisor*), perawatan dan pemeliharaan peralatan militer (*service & maintenance*), hingga penyediaan peralatan, logistik dan data intelejen.¹⁵

Carloz Ortiz dalam buku *Private Armed Forces and Global Security: A Guide to the Issues* juga menambahkan bahwa PMC sebagai sebuah perusahaan, tidak berbeda dengan MNC pada umumnya dimana kepemilikan umumnya berdasarkan saham yang dijual secara bebas, dikelola oleh *board of directors*, serta terdaftar dan beroperasi legal secara hukum di negara tempat PMC itu didirikan. Bila dilihat secara sekilas maka PMC dapat dikatakan sebagai *organized mercenary* sama seperti Mafia yang dapat dikatakan sebagai *organized crime*.

Hasil dan Diskusi

Private Military Companies: How Powerful Are They?

Meskipun telah ada sejak dulu namun PMC yang kita kenal seperti saat ini sesungguhnya baru mengalami perkembangan pesat sejak berakhirnya Perang Dingin. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini, diantaranya; pertama, pada era Perang Dingin terjadi perlombaan senjata antara blok barat dan blok timur yang berdampak luas pada

¹¹ Puchala, Donald J. "Of pirates and terrorists: what experience and history teach." *Contemporary Security Policy* 26, no. 1 (2005): 1-24.

¹² Singer, Peter Warren. *Corporate warriors: The rise of the privatized military industry*. Cornell University Press, 2008.

¹³ Connelly, Owen. "Once there were titans: Napoleon's generals and their battles, 1800-1815." *The Journal of Military History* 72, no. 1 (2008): 237-238.

¹⁴ Robins, Nick. "The corporation that changed the world: how the East India Company shaped the modern multinational." *Asian Affairs* 43, no. 1 (2012): 12-26.

¹⁵ Ortiz, Carlos. *Private armed forces and global security: A guide to the issues*. ABC-CLIO, 2010.

peningkatan jumlah personel militer di negara-negara tersebut sehingga terdapat sedikit kebutuhan akan PMC. Namun begitu Perang Dingin berakhir maka terjadi pemotongan sebagian besar anggaran militer yang berdampak pada pemotongan anggaran militer. Para personel yang diberhentikan inilah yang kemudian banyak beralih profesi menjadi personel PMC. Diperkirakan sekitar 6.000.000 personel militer diseluruh dunia diberhentikan paska berakhirnya Perang Dingin, baik dari blok barat dan blok timur maupun dari negara-negara dunia ketiga.¹⁶ Banyak diantaranya merupakan anggota pasukan khusus yang tentunya memiliki nilai lebih dibanding tentara biasa seperti *South Africa 32nd Reconnaissance Battalion* yang kemudian membentuk PMC mereka sendiri dan para mantan anggota KGB dimana sekitar 70% diantaranya bergabung dengan PMC.¹⁷

Faktor kedua adalah pergeseran fokus konflik yang pada Perang Dingin fokus pada konflik antar negara menjadi konflik antara negara dengan kelompok separatis dan teroris serta perang sipil. Sedangkan, perang terhadap terorisme global memiliki kontur yang merubah cara pandang negara dalam melihat perang, sifat dari kelompok separatis dan teroris serta perang sipil ini yang banyak bersifat transnasional menyebabkan berbagai halangan bagi tentara nasional akibat berbagai benturan dengan kedaulatan negara lainnya serta halangan-halangan politis ketika melakukan operasi transnasional sehingga diperlukan sebuah solusi baru yang dianggap mampu mengatasi halangan-halangan ini dan PMC dianggap sebagai salah satu jawabannya.¹⁸ Bukan hanya negara saja yang kemudian banyak menggunakan jasa dari PMC namun juga

para kelompok separatis itu sendiri serta para International Non-Governmental Organisation (INGO) yang berusaha memberikan bantuan kemanusiaan di wilayah tersebut.

Faktor ketiga, semakin banyaknya perusahaan-perusahaan pendukung sektor militer yang mengalami privatisasi sehingga dianggap lebih efektif dan efisien bila penanganannya ditangani oleh pihak swasta.¹⁹ Perusahaan-perusahaan seperti perusahaan telekomunikasi, perusahaan tekstil yang memproduksi seragam militer, perusahaan kontraktor bangunan serta perusahaan yang memproduksi suku cadang kendaraan yang kesemuanya memiliki peran krusial untuk mendukung sektor militer telah banyak dikuasai oleh pihak swasta sehingga mendorong pemerintah negara untuk menggunakan kontraktor-kontraktor swasta tersebut dibandingkan harus memproduksi semuanya sendiri. Hal ini pada akhirnya meluas hingga menyangkut pada bidang-bidang lain pada sektor industri yang mendorong perkembangan pesat PMC.

Walapun tidak terdapat data yang pasti mengenai jumlah perusahaan dan personel yang bergerak dalam bisnis ini diseluruh dunia, namun 180.000 personel PMC yang beroperasi di Iraq, jumlah yang lebih besar dari total tentara Amerika Serikat di negara tersebut, serta biaya yang telah dihabiskan sebesar \$100 miliar untuk menyewa PMC hingga 2008 atau sekitar 1/5 dari biaya total Perang Iraq tentunya dapat memberi sedikit gambaran seberapa besar bisnis PMC ini sesungguhnya.²⁰

Beberapa PMC bahkan memiliki jumlah personel yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah personel dan budget militer di banyak negara. Salah satunya adalah Securitas AB, PMC dari Swedia yang menguasai 11% dari pangsa

¹⁶ Singer, Peter W. "Corporate warriors: The rise of the privatized military industry and its ramifications for international security." *International security* 26, no. 3 (2002): 186-220.

¹⁷ Ibid

¹⁸ Avant, Deborah. "Private military companies and the future of war." *Foreign Policy Research Institute* (2006).

¹⁹ Singer, Peter W. "Corporate warriors: The rise of the privatized military industry and its ramifications for international security." *International security* 26, no. 3 (2002): 186-220.

²⁰ Risen, James. "Use of Iraq contractors costs billions, report says." *New York Times* 11 (2008).

pasar PMC diseluruh dunia ini mengoperasikan sekitar 260.000 personil di 40 negara. Walaupun personel yang dimiliki masih lebih kecil dibandingkan Indonesia yang mencapai 302.000 personel namun jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan jumlah personel militer negara lain seperti negara-negara tetangga Indonesia. Malaysia contohnya, yang memiliki 109.000 personel militer.²¹ Begitu pula dengan Philipina dengan 120.000 personel, Singapura dengan 75.000 personel, Timor Leste dengan 1.332 personel dan Australia dengan 57.500 personel.²²

Begitu pula bila keuntungan perusahaan dibandingkan dengan budget militer banyak negara. Contohnya Indonesia yang memiliki budget militer sebesar \$4,908 miliar pada tahun 2009, bandingkan dengan keuntungan Securitas AB yang mencapai \$9,490 miliar atau sekitar dua kali dari budget militer Indonesia pada tahun yang sama.²³ Begitu pula bila dibandingkan dengan Malaysia pada periode yang sama dengan budget militer sebesar \$4,078 miliar dan Philipina yang hanya sebesar \$1,424 miliar.²⁴

Faktor lainnya yang semakin menguatkan status PMC adalah keterlibatan mereka dengan para pembuat kebijakan sehingga membuat para PMC tersebut memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan politik yang akan diambil. Perusahaan-perusahaan seperti Blackwater Worldwide, yang kini telah berganti nama menjadi Xe Service, dan DynCorp telah lama membiayai calon-calon legislatif dan eksekutif di Amerika Serikat dengan harapan mendapatkan kontrak eksklusif bila calon yang mereka dukung terpilih.²⁵ Pada tahun

2001 diperkirakan 10 PMC menghabiskan dana sebesar \$32 juta untuk biaya kampanye dan melobi para pengambil kebijakan di Amerika Serikat.²⁶

Kebangkitan *Private Military Company* Sebagai Kekuatan Privat

Zabci Filiz dalam tulisannya yang berjudul *Private Military Companies: Shadow Soldiers of Neo-Colonialism* menyinggung mengenai trend baru paska Perang Dingin dalam Multi National Corporation (MNC) yaitu memiliki kekuatan militer/PMC mereka sendiri atau menyewa PMC yang telah ada untuk melindungi kepentingan bisnis mereka, salah satunya adalah Kellog Brown & Root PMC ini tidak lain adalah anak perusahaan Halliburton, salah satu MNC bidang energi terbesar yang beroperasi di Iraq. Tujuan utama Kellog Brown & Root, selain disewa oleh pemerintah Amerika Serikat untuk membasmi kelompok teroris, adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan bisnis Halliburton terutama dalam hal eksplorasi minyak di Iraq.²⁷ Dengan 40.000 personel militer yang dimiliki Kellog Brown & Root di Iraq, lengkap dengan persenjataan berat seperti kendaraan lapis baja, peluncur roket, kendaraan militer nir-awak dan helikopter penyerang menjadikan PMC ini sebagai PMC terkuat di Iraq.²⁸ Jumlah ini lebih dari 4 kali lipat jumlah personel militer Inggris di Iraq yang hanya mencapai sekitar 9000 personel (Ortiz, 2010). Membuat Halliburton bukan hanya MNC yang sangat kuat secara ekonomi namun juga militer, khususnya di Iraq.

Tapi apakah ini benar-benar sebuah trend baru paska Perang Dingin? Menurut pandangan tulisan ini jawabannya adalah

²¹ Hackett, James T., ed. *The Military Balance 2014*. Routledge, 2014.

²² Ibid

²³ SIPRI, DB. "SIPRI military expenditure database." (2010).

²⁴ SIPRI, DB. "SIPRI military expenditure database." (2010).

²⁵ Ortiz, Carlos. *Private armed forces and global security: A guide to the issues*. ABC-CLIO, 2010.

²⁶ Yeoman, Barry (2003) "Soldiers of Good Fortune", diakses pada tanggal 20 Januari 2011 di <http://motherjones.com/politics/2003/05/soldiers-good-fortune>

²⁷ Zabci, Filiz. "Private military companies: 'Shadow soldiers' of neo-colonialism." *Capital & Class* 31, no. 2 (2007): 1-10.

²⁸ Risen, James. "Use of Iraq contractors costs billions, report says." *New York Times* 11 (2008).

“tidak”, perkembangan PMC saat ini dapat dikatakan sebagai kebangkitan kembali setelah sebelumnya terjadi pada era kolonialisasi.

*The PMCs are not a new phenomenon. They are as ancient as war. Forever there have been warriors or soldiers prepared to work for foreign powers for reward or glory. Only the terminology changes being called Heroes, Privateers, Mercenaries, Condottieries, free companies, or more recently contractors and more specifically “Private Military Companies”.*²⁹

Untuk membahas mengenai hal itu maka terlebih dahulu kita harus melihat sejarah hubungan antara PMC dan MNC dalam era kolonialisasi. Sebelumnya telah disebutkan bahwa perkembangan MNC dan kolonialisasi sebagai faktor utama pendorong terbentuk PMC dan tersebut akan berusaha diperdalam dalam sub-bab ini.

Jikalau mempelajari terlebih dahulu sejarah dari dua MNC tertua di dunia yang terlahir di awal era kolonialisasi yaitu *British East India Company* yang berdiri pada tahun 1600 dan *Dutch East India Company*, yang di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan VOC, berdiri pada tahun 1602.³⁰ Disebut sebagai MNC tertua didunia karena keduanya memiliki cabang produksi dan pemasaran diberbagai wilayah dunia mulai dari benua Amerika, Eropa, Afrika hingga Asia serta telah menerapkan ciri-ciri MNC modern seperti kepemilikan saham, board of directors, serta pengakuan perusahaan sebagai entitas legal dimata hukum.

Pembentukan kedua MNC ini dapat menggambarkan tujuan utama era

kolonialisasi yaitu menemukan wilayah penghasil sumber daya baru serta menemukan wilayah pasar baru untuk memasarkan produk mereka, ini tentunya tidak berbeda dengan tujuan MNC di era kontemporer saat ini. Dalam perjalanannya kedua MNC ini sangat sedikit mendapat kontrol pemerintah sehingga bebas melakukan ekspansi perusahaan. Ketika mengalami benturan dengan masyarakat, pemerintah serta perusahaan lokal yang mengancam kelangsungan bisnis mereka maka kedua MNC ini menganggap pembangunan kekuatan militer swasta sebagai jawabannya mengingat keduanya beranggapan perlindungan dari pemerintah mereka masing-masing, Inggris dan belanda tidak memadai.³¹ Inilah kemudian kelahiran PMC pertama didunia. Pembentukan militer swasta di kedua MNC tersebut ditambah lemahnya kontrol pemerintah untuk meregulasi PMC mereka menjadikan keduanya sangat kuat bahkan melebihi kemampuan militer dan ekonomi negara. Hal ini terbukti dari kemampuan British East India Company menjajah sebagian besar wilayah Asia Selatan seperti India, Pakistan, Sri Lanka dan Bangladesh dan VOC yang berhasil menjajah sebagian besar wilayah Indonesia.³²

Dengan memiliki cabang di berbagai belahan dunia, wilayah jajahan yang luas, memiliki mata uang sendiri, serta kekuatan militer dan ekonomi yang sangat besar menggambarkan bagaimana sebuah MNC yang memiliki tujuan utama untuk meraup keuntungan bisnis sebesar-besarnya bisa menjadi begitu berbahaya dan rawan untuk melakukan eksploitasi.³³ Berbeda dengan tentara nasional yang memiliki tujuan utama demi kepentingan publik, hubungan yang dimiliki oleh PMC dengan MNC murni demi kepentingan bisnis sehingga sering kali kekuatan militer yang mereka miliki

²⁹ Deschamps, Sebastian. "Towards the use of the private military companies in the United Nations Peacekeeping operations." *Peace Operations Training Institute* (2005).

³⁰ Robins, Nick. "The corporation that changed the world: how the East India Company shaped the modern multinational." *Asian Affairs* 43, no. 1 (2012): 12-26.

³¹ Ibid

³² Ibid

³³ Robins, Nick. "The corporation that changed the world: how the East India Company shaped the modern multinational." *Asian Affairs* 43, no. 1 (2012): 12-26.

digunakan untuk eksploitasi. Selain itu kepentingan bisnis yang mengesampingkan nilai moral membuat MNC ini menggunakan kekuatan militer dan ekonomi yang mereka miliki untuk mempengaruhi berbagai kebijakan politik di banyak negara demi kepentingan bisnis mereka semata.³⁴ Ketika kedua MNC ini telah begitu kuat sehingga mampu mengancam negara serta dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme diantara MNC tersebut dengan pemerintah, memaksa Inggris dan Belanda untuk mengambil alih kepemilikan keduanya, *British East India Company* pada 1874 dan VOC pada 1798.³⁵

Hal ini ditambah dengan kebangkitan nasionalisme yang diikuti pembentukan tentara nasional pada era Napoleon paska revolusi perancis, telah mampu mengakhiri trend kepemilikan militer swasta oleh MNC untuk sementara hingga kebangkitannya kembali di akhir abad ke-20. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, berakhirnya Perang Dingin melahirkan berbagai konflik baru seperti ancaman separatisme, terorisme dan perang saudara. Konflik-konflik ini “memaksa” MNC yang berada di wilayah tersebut untuk melakukan adaptasi dengan membangun kekuatan PMC mereka sendiri atau menyewa PMC yang telah ada. Diabad ke-21 ini, MNC seperti BP, Exxon dan Halliburton yang bergerak dalam sektor energi utamanya eksplorasi minyak dan De Beers yang bergerak dalam pertambangan dan jual beli berlian telah memiliki PMC mereka sendiri dalam jumlah puluhan ribu, lengkap dengan persenjataan berat layaknya tentara nasional sebuah negara inilah yang saya pandang sebagai kebangkitan kedua dari private military company.³⁶

Sama seperti kasus *British East India Company* dan VOC yang membangun kekuatan PMC mereka karena alasan melindungi kepentingan bisnis MNC

kontemporer juga menggunakan alasan yang sama mengingat mereka umumnya beroperasi di berbagai wilayah konflik seperti Afrika dan Timur Tengah. Perkembangan pesat kekuatan militer mereka juga disebabkan oleh lemahnya regulasi dan pemerintah lokal tempat mereka beroperasi seperti kasus *British East India Company* dan VOC. Jadi tentunya tidak tepat bila dikatakan ini sebagai sebuah trend baru melainkan hanya sebuah business as usual seperti yang telah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu. Namun bila kita mau belajar dari sejarah maka bila hal ini tidak segera ditanggulangi maka tidak lepas kemungkinan MNC-MNC ini akan menjadi terlalu kuat melebihi negara mereka beroperasi seperti *British East India Company* dan VOC apalagi mengingat MNC seperti Halliburton De Beers umumnya beroperasi di negara dunia ketiga yang memiliki pemerintahan yang lemah dan korup. Mengatakan bahwa kasus seperti *British East India Company* atau VOC akan segera terulang kembali tentunya masih sedikit terlalu dini. Namun bila dilihat sejarahnya kedua MNC tersebut tidak langsung tumbuh menjadi besar namun melakukan ekspansi sedikit demi sedikit dan mengingat perkembangan MNC dan PMC saat ini yang sangat pesat maka menurut pandangan saya ini merupakan waktu yang tepat bagi kita untuk mulai merasa “sedikit” khawatir.

Kesimpulan

Kebangkitan PMC sebagai suatu entitas para-militer di dalam dinamika konflik keamanan di berbagai belahan dunia yang dibahas di dalam artikel ini telah menunjukkan faktor-faktor di dalam globalisasi ekonomi yang melandasi kebangkitan PMC sebagai aktor di dalam konstelasi keamanan internasional. Pertama, pada era Perang Dingin terjadi perlombaan senjata antara blok barat dan blok timur yang berdampak luas pada peningkatan jumlah personel militer di negara-negara tersebut sehingga terdapat sedikit kebutuhan akan PMC. Namun begitu Perang Dingin berakhir maka terjadi pemotongan sebagian besar

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid

³⁶ Harris, William (2010) “How Mercenaries Work” diakses pada tanggal 20 Januari 2011 di <http://science.howstuffworks.com/mercenary5.htm>

anggaran militer yang berdampak pada pemotongan anggaran militer.

Kedua adalah pergeseran fokus konflik yang pada Perang Dingin fokus pada konflik antar negara menjadi konflik antara negara dengan kelompok separatis dan teroris serta perang sipil. Sedangkan, perang terhadap terorisme global memiliki kontur yang merubah cara pandang negara dalam melihat perang, sifat dari kelompok separatis dan teroris serta perang sipil ini yang banyak bersifat transnasional menyebabkan berbagai halangan bagi tentara nasional akibat berbagai benturan dengan kedaulatan negara lainnya serta halangan-halangan politis ketika melakukan operasi transnasional sehingga diperlukan sebuah solusi baru yang dianggap mampu mengatasi halangan-halangan ini dan PMC dianggap sebagai salah satu jawabannya.

Faktor ketiga, semakin banyaknya perusahaan-perusahaan pendukung sektor militer yang mengalami privatisasi sehingga dianggap lebih efektif dan efisien bila penanganannya ditangani oleh pihak swasta. Perusahaan-perusahaan seperti perusahaan telekomunikasi, perusahaan tekstil yang memproduksi seragam militer, perusahaan kontraktor bangunan serta perusahaan yang memproduksi suku cadang kendaraan yang kesemuanya memiliki peran krusial untuk mendukung sektor militer telah banyak dikuasai oleh pihak swasta sehingga mendorong pemerintah negara untuk menggunakan kontraktor-kontraktor swasta tersebut dibandingkan harus memproduksi semuanya sendiri.

Hal ini pada akhirnya meluas hingga menyangkut pada bidang-bidang lain pada sektor industri yang mendorong perkembangan pesat PMC. Sedangkan pada bagian akhir dari artikel ini, telah dijelaskan mengapa PMC merupakan suatu entitas yang sebenarnya sudah ada sejak dahulu namun pasca perang dingin, di tengah semakin deras nya proses globalisasi ekonomi dunia, mereka mendapatkan panggung untuk menguatkan eksistensinya sebagai penanda

kebangkitan mereka di dalam konstelasi keamanan dunia. Oleh karena itu, tulisan ini sepakat terhadap pepatah yang mengatakan bahwasanya *“Those who cannot learn from history are doomed to repeat it”* -George Santayana.

DAFTAR PUSTAKA

- Avant, Deborah. "Private military companies and the future of war." Foreign Policy Research Institute (2006).
- Connelly, Owen. "Once there were titans: Napoleon's generals and their battles, 1800-1815." *The Journal of Military History* 72, no. 1 (2008): 237-238.
- Deschamps, Sebastian. "Towards the use of the private military companies in the United Nations Peacekeeping operations." Peace Operations Training Institute (2005).
- Zabci, Filiz. "Private military companies: 'Shadow soldiers' of neo-colonialism." *Capital & Class* 31, no. 2 (2007): 1-10.
- Hackett, James (2010) "The Military Balance 2010", dalam International Institute for Strategic Studies, London: Routledge
- Harris, William (2010) "How Mercenaries Work" diakses pada tanggal 20 Januari 2011 di <http://science.howstuffworks.com/mercenary5.htm>
- Kinsey, Christopher. *Corporate soldiers and international security: The rise of private military companies*. Routledge, 2006
- Kusumawardhana, Indra. "DARI INTERNASIONALISME KE GLOBALISASI: WHAT NEXT?." *Jurnal Populis* 2, no. 3 (2017).
- Kusumawardhana, Indra, and Rusdi Jarwo Abbas. "Indonesia di Persimpangan: Urgensi "Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender" di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires Pada Tahun 2017." *Jurnal HAM* 9, no. 2 (2018): 153-174.
- Kusumawardhana, Indra. "Globalisation and Strategy: "Negara, Teritori dan Kedaulatan di Era Globalisasi"." *Ilmu dan Budaya* 40, no. 54 (2018).
- Mingst, Karen A., Heather Elko McKibben, and Ivan M. Arreguin-Toft. *Essentials of international relations*. WW Norton & Company, 2018.
- Ortiz, Carlos. *Private armed forces and global security: A guide to the issues*. ABC-CLIO, 2010.
- Risen, James. "Use of Iraq contractors costs billions, report says." *New York Times* 11 (2008).
- Robins, Nick. "The corporation that changed the world: how the East India Company shaped the modern multinational." *Asian Affairs* 43, no. 1 (2012): 12-26.
- Scholte, Jan Aart. 2001, 'The Globalization of World Politics' dalam *The Globalization of World Politics*, ed. Baylis, J. & Smith, S., Oxford University Press Inc., New York.
- Securitas AB (2011) "About Securitas", diakses pada tanggal 20 Januari 2011 di <http://www.securitas.com/en/About-Securitas/>
- Singer, Peter W. "Corporate warriors: The rise of the privatized military industry and its ramifications for international security." *International security* 26, no. 3 (2002): 186-220.
- Singer, Peter (2008) "Private Military Firms.", dalam Microsoft® Student 2009 [DVD], Redmond WA; Microsoft Corporation
- Spearin, Christopher. *Private military and security companies and states: Force divided*. Springer, 2017:2.
- Vogel, David. "Private global business regulation." *Annu. Rev. Polit. Sci.* 11 (2008): 261-282.
- Yeoman, Barry (2003) "Soldiers of Good Fortune", diakses pada tanggal 20 Januari 2011 di <http://motherjones.com/politics/2003/05/soldiers-good-fortune>.